



ANALISIS ISU TERKINI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2019



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



ANALISIS ISU TERKINI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2019

ANALISIS ISU TERKINI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 2019

ISBN : 978-602-5407-42-0
Katalog No. : 9101009.74
Publikasi : 74550.2001

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : x + 37 halaman

Naskah:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Penyunting:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Desain Kover oleh:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Pencetak:

CV Metro Graphia Kendari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR



Analisis Isu Terkini 2019 merupakan publikasi Badan Pusat Statistik yang menyajikan gambaran fenomena yang terjadi pada tahun 2018-2019. Publikasi ini membahas empat tema yang terjadi dalam 2 tahun terakhir.

Tema pertama berjudul “Pengaruh Investasi Industri Logam Dasar terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara”. Tema kedua berjudul “Pengaruh Aksi Unjuk Rasa terhadap Inflasi Kota Kendari”. Tema ketiga berjudul “Dampak Bencana Banjir 2019 terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Tenggara”. Tema keempat berjudul “Pengaruh Pilpres 2019 terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara”. Semoga publikasi ini bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi semua pihak yang berkepentingan. Ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberi masukan dalam penyusunan publikasi ini.

Kendari, Desember 2019
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

MOH EDY MAHMUD, S.Si., MP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
TEMA 1. PENGARUH INVESTASI INDUSTRI LOGAM DASAR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1
A. Pendahuluan.1
B. Perkembangan Investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara2
C. Metodologi8
D. Kajian Literatur8
E. Kesimpulan10
F. Referensi10
TEMA 2. PENGARUH AKSI UNJUK RASA TERHADAP INFLASI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA	11
A. Pendahuluan11
B. Metodologi11
C. Kajian Literatur12
D. Unjuk Rasa dan Inflasi di Kota Kendari12
E. Hasil dan Pembahasan14

F.	Kesimpulan14
G.	Referensi14
H.	Lampiran15

TEMA 3. Dampak Bencana Banjir 2019 terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Tenggara17

A.	Pendahuluan.17
B.	Gambaran Umum Wilayah Bencana18
C.	Metode Analisis Data25
D.	Analisis25
E.	Kesimpulan26
F.	Referensi27
G.	Lampiran27

TEMA 4. Pengaruh Pilpres 2019 terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara31

A.	Pendahuluan.31
B.	Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Tenggara32
C.	Pertumbuhan Ekonomi.33
D.	Kesimpulan34
E.	Referensi34
F.	Lampiran35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara ADHK menurut Pengeluaran.	2
Tabel 1.2	Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Tenggara	3
Tabel 1.3	Realisasi Investasi PMDN (Rp) menurut Kabupaten Prov. Sulawesi Tenggara.	4
Tabel 1.4	Realisasi Investasi PMA (\$) menurut Kabupaten Prov. Sulawesi Tenggara	5
Tabel 1.5	Laju pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (persen) 6	
Tabel 1.6	Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Pertambangan dan Pengalihan (persen) 2014 – 2018.. . . .	7
Tabel 1.7	Hasil Pengujian Uji Wilcoxon Tahap 1	28
Tabel 1.8	Hasil Pengujian Uji Wilcoxon Tahap 2	28
Tabel 1.9	Hasil Pengujian Inflasi	36
Tabel 1.10	Hasil Pengujian PDRB	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara	3
Gambar 2.	Sektor utama Penanaman Modal Asing (a) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (b) di Sulawesi Tenggara.	5
Gambar 3.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja pada sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan (Jiwa) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 – 2018..	7
Gambar 4.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja pada sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan (Jiwa) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 – 2018..	8
Gambar 5.	Jumlah Aksi Unjuk Rasa Kota Kendari 2018 dan 2019	13
Gambar 6.	Inflasi Kota Kendari Tahun 2018 hingga 2019	14
Gambar 7.	Peta Kabupaten Konawe Utara.	18
Gambar 8.	Peta Kabupaten Konawe	19
Gambar 9.	Peta Kabupaten Konawe Selatan	20
Gambar 10.	Angka Pengungsi (Jiwa)	21
Gambar 11.	Angka Kerusakan Rumah (Unit)	21
Gambar 12.	Angka Kerusakan Jembatan (Unit)	22
Gambar 13.	Angka Kerusakan Sekolah (Unit)	22
Gambar 14.	Angka Kerusakan Lahan Pertanian (Hektar)	23

Gambar 15. Angka Kerusakan Lahan Jagung (Hektar)	23
Gambar 16. Angka Kerusakan Lahan Lain (Hektar)	24
Gambar 17. Angka Kerusakan Tambak (hektar)	24
Gambar 18. Angka Kerugian (Milyar Rupiah)	25
Gambar 19. Angka TPT 3 Kabupaten dan Provinsi	26
Gambar 20. Inflasi Tahun 2018.	32
Gambar 21. Inflasi Tahun 2019.	33
Gambar 22. Angka Pertumbuhan PDRB I-2017 s/d III-2019	34

<https://sultra.bps.go.id>

TEMA 1. PENGARUH INVESTASI INDUSTRI LOGAM DASAR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Tujuan tersebut juga diadopsi kedalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) sehingga pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai persoalan bangsa khususnya penyerapan tenaga kerja yang muaranya adalah kesejahteraan masyarakat.

Salah satu yang diyakini memiliki kontribusi terhadap Bergeraknya pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah investasi. Investasi secara umum dikenal dengan penanaman modal dengan harapan akan adanya imbal hasil dimasa depan. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional maupun regional, Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dinegara dengan tingkat penduduk yang besar, umumnya memiliki rasio investasi terhadap jumlah penduduk yang relatif kecil. Sehingga, negara tersebut kerap mengundang investor asing untuk masuk dalam negaranya. Investasi asing tidaklah selalu memberikan keuntungan terhadap negara terutama dalam jangka panjang. Sedangkan dalam jangka pendek atau menengah, investasi asing sangat menguntungkan dalam pertumbuhan ekonomi dan memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan penduduknya.

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu destinasi investasi di Indonesia. Pada tahun 2018 tercatat realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 1,60341 trilyun rupiah. Sedangkan penanaman modal asing (PMA) sebesar 672,93 juta USD. Total nilai tersebut tidak mencapai nilai yang ditargetkan pemerintah sebesar Rp. 15,88 Triliyun ditahun 2018. Walaupun demikian Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara dari tahun 2014 hingga 2018 menunjukkan arah yang positif. Sedangkan Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sejak tahun 2014 hingga 2018 menunjukkan tren yang fluktuatif dan mengalami perlambatan ditahun 2018.

Tabel 1.1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara ADHK menurut Pengeluaran.

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi rumah tangga	6,37	5,11	6,18	6,12	6,17
2. Konsumsi LNPR	11,82	(2,49)	4,47	9,69	8,91
3. Konsumsi pemerintah	2,39	4,46	2,66	6,26	6,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	15,86	4,22	7,65	8,74	5,85
5. Perubahan Inventori	147,31	(33,93)	18,10	303,55	(89,27)
6. Ekspor	(22,46)	(47,14)	(9,38)	23,05	104,17
7. Import	(8,19)	(42,38)	(5,70)	31,23	53,68
Total Pertumbuhan PDRB/ Pertumbuhan Ekonomi	6,26	6,88	6,51	6,76	6,42

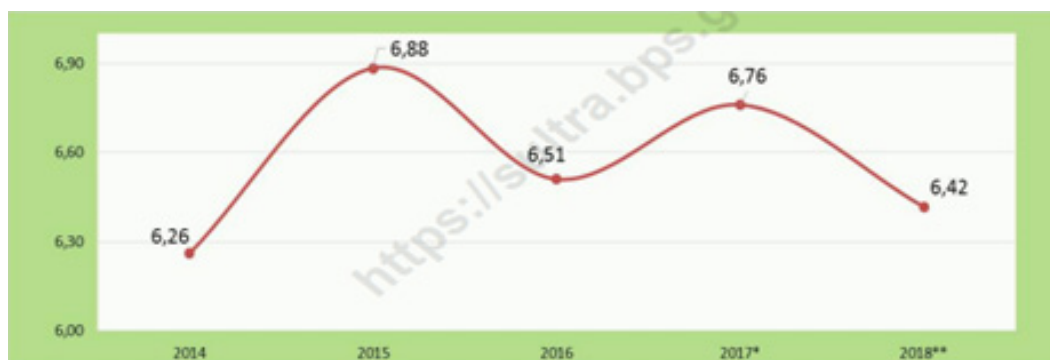
Sumber : BPS

Pertumbuhan investasi yang tercermin dalam PMTB di Sulawesi Tenggara dalam beberapa tahun terakhir diharapkan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu investasi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Kajian ini mengulas pengaruh investasi khususnya sektor industri pengolahan (disinyalir sebagai sektor favorit) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara dan tingkat penyerapan tenaga kerja.

B. Perkembangan Investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,42. Angka tersebut adalah di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 5,2 persen. Hal ini berarti Provinsi Sulawesi Tenggara mampu menaikkan perekonomiannya di atas rata-rata. Adapun salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah pembentukan investasi.

Gambar 1. Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara



Realisasi investasi sendiri dapat dilihat pada tabel 1.2 PMDN Provinsi Sulawesi Tenggara dari Tahun 2016 hingga 2019 cenderung meningkat meskipun di tahun 2018 mengalami kontraksi, namun di akhir tahun 2019 diperkirakan akan meningkat tajam. Hal tersebut dikarenakan investasi pada triwulan 1 dan 2 (semester 1) telah mencapai angka 2,5 triliun rupiah naik sebesar 54,4 % dari tahun 2018. Hal yang sama terjadi pada investasi PMA, realisasi investasi terbesar terjadi di tahun 2017 mencapai lebih dari \$ 800 juta. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara masih menjadi lahan yang diminati oleh para investor baik asing maupun dalam negeri.

Tabel 1.2 Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun	PMDN (Rp)	PMA (\$)
2016	2.470.217.864.093	371.169.808,42
2017	2.573.684.782.266	831.068.223,66
2018	1.667.106.616.858	719.631.215
2019 (Trw I dan Trw 2)	2.574.029.207.812	974.707.543

Sumber : Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 17 kabupaten/kota. Masing-masing memiliki keunggulan di sektor lapangan usaha yang berbeda-beda. Beberapa Kabupaten memiliki potensi pertambangan yang cukup besar diantaranya Kabupaten Kolaka, Bombana, Konawe Selatan, Konawe dan Konawe Utara. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan pertambangan yang masuk ke daerah namun Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah dipangkas oleh pemerintah dari yang semula mencapai 500 IUP sekarang tidak mencapai 100 IUP lagi.

Jika dilihat dari besarnya investasi PMDN maka tahun 2017 investasi terbesar terdapat di Kabupaten Bombana dengan nilai investasi mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Dikutip dari laman <http://kendariapos.co.id> (posted 19 Des 2019) Kabupaten Bombana membuka peluang yang besar untuk masuknya investor. Bahkan kini telah masuk ke daerah tersebut tiga perusahaan

besar yang berinvestasi di sektor industri smelter, pabrik baja dan sektor perkebunan tebu serta industri gula. Pada tahun 2018 investasi terbesar di kabupaten Konawe Selatan dengan nilai investasi juga mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Adapun untuk pertengahan tahun 2019 investasi terbesar di Kabupaten Kolaka juga telah mencapai 1,3 triliun rupiah.

Tabel 1.3 Realisasi Investasi PMDN (Rp) menurut Kabupaten Prov. Sulawesi Tenggara.

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019 (Sem 1)
Kolaka	703.764.890.139	468.622.274.204	1.323.481.345.197
Kolaka Utara	139.844.600	1.451.875	158.775
Kolaka Timur	-	81.843.165.853	21.378.100.960
Konawe	195.132.769.893	-	133.084.683.538
Konawe Kepulauan	-	-	27.856.489.372
Konawe Selatan	427.906.408.250	1.015.864.786.746	52.486.980.947
Konawe Utara	553.509.000	654.010.875	5.000.000
Buton	13.992.218.548	36.581.492.983	-
Buton Utara	18.500.000.000	778.000.000	978.283.005
Bau-Bau	-	2.150.000.000	-
Bombana	1.151.549.171.936	-	997.225.000.000
Muna	2.930.000.000	300.000.000	171.500.000
Muna Barat	-	1.123.000.000	942.920.487
Kendari	59.215.969.900	59.188.434.322	16.418.745.531

Sumber : Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara

Berbeda halnya dengan Penanaman Modal Asing (PMA), untuk tahun 2017 dan 2018 investasi terbesar berada di Kabupaten Konawe dan disusul Kabupaten Konawe Utara. Sedangkan pertengahan tahun 2019 investasi terbesar terdapat di Kota Kendari.

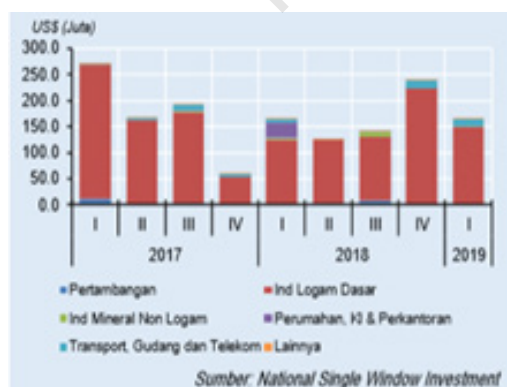
Tabel 1.4 Realisasi Investasi PMA (\$) menurut Kabupaten Prov. Sulawesi Tenggara

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019 (Sem 1)
Kolaka	138.923,72	2.133.772,22	855.845,93
Kolaka Timur	3.503,76	951,88	-
Konawe	774.775.510,63	684.381.391,09	480.339.165,54
Konawe Kepulauan	129.200,03	-	-
Konawe Selatan	751.910,14	1.269,49	91.112,00
Konawe Utara	27.869.771,47	17.972.268,21	1.728.732,69
Buton	5.137.311,62	11.922.015,30	2.145.558,13
Buton Selatan	7.589,69	81,46	-
Bau-Bau	1.487.000,00	37.313,43	-
Bombana	7.829,33	2.303.066,15	133.408,33
Muna	-	605.557,96	-
Kendari	20.759.673,27	273.528,19	489.413.720,35

Sumber : Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara

Investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara terjadi di beberapa sektor lapangan usaha. Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat sektor utama Penanaman Modal Asing (PMA) adalah sektor industri logam dasar. Nilai investasi tertinggi terjadi di tahun 2017 mencapai \$784 juta. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengolahan hasil pertambangan masih menjadi primadona utama bagi investor asing. Demikian pula PMDN nilai investasi sektor industri logam dasar mencapai 2,1 triliun rupiah.

Gambar 2. Sektor utama Penanaman Modal Asing (a) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (b) di Sulawesi Tenggara.



Seperti telah dijelaskan diatas bahwa investasi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan maka pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 terjadi pada industri logam dasar. Hal ini juga dipicu oleh larangan (Undang-undang Perindustrian) ekspor bahan mentah, maka hal tersebut meningkatkan investasi disektor industri logam dasar yang juga mendorong peningkatan produksi logam dasar ferronikel.

Tabel 1.5 Laju pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (persen)

No.	Sektor Industri	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Industri Makanan dan Minuman	15,22	10,89	9,4	7,79	-1,39
2.	Industri Pengolahan Tembakau	17,57	1,29	5,45	-0,98	1,48
3.	Industri Tekstil dan pakaian jadi	12,03	7,06	7,84	-2,56	5,29
4.	Industri Logam Dasar	-2,37	4,73	9,38	5,22	17,54
5.	Industri Furnitur	2,8	5,34	11,41	7,05	7,71
6.
	Industri Pengolahan	7,74	7,73	8,9	6,38	4,83

Sumber: BPS

Adapun sektor pertambangan dan penggalian jika dilihat dari sisi peranan terhadap PDRB maka sektor pertambangan bijih logam memberikan peranan terbesar dibandingkan jenis pertambangan lainnya. Artinya pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan bijih logam cenderung stabil seiring bertambahnya produksi dan investasi di sektor industri logam dasar.

Disisi lain, menurut Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Bank Indonesia kinerja Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami perlambatan. Hal tersebut dipicu oleh permasalahan yang timbul pada Perusahaan Pertambangan yang berujung pada pencabutan dan pembekuan 15 izin usaha pertambangan di Sulawesi Tenggara.

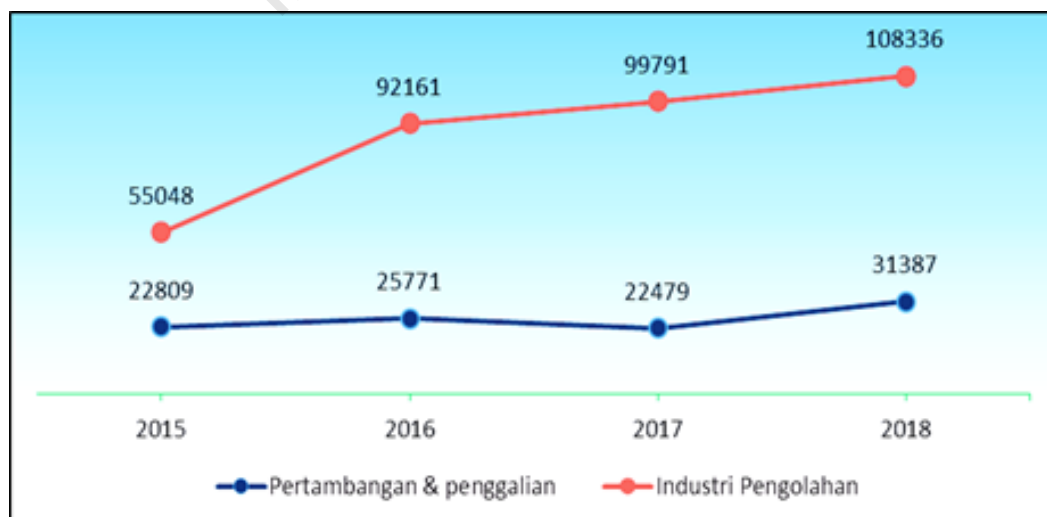
Tabel 1.6 Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian (persen) 2014 – 2018.

No.	Lapangan Usaha/Industri	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
2.	Pertambangan Batubara dan lignit	-	-	-	-	-
3.	Pertambangan Bijih Logam	50,64	49,84	46,20	52,18	53,14
4.	Pertambangan dan Penggalian lainnya	49,36	50,16	53,80	47,82	46,86
	Pertambangan dan Penggalian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Prov. Sulawesi Tenggara menurut Lapangan Usaha

Tumbuhnya investasi khususnya pertambangan dan industri logam dasar di Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. Selain itu adanya investasi dalam peralatan modal atau pembentukan modal tidak saja dapat meningkatkan faktor produksi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Jika dilihat dari grafik jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun terutama pada sektor industri pengolahan. Peningkatan ini selaras dengan meningkatnya investasi pada sektor tersebut.

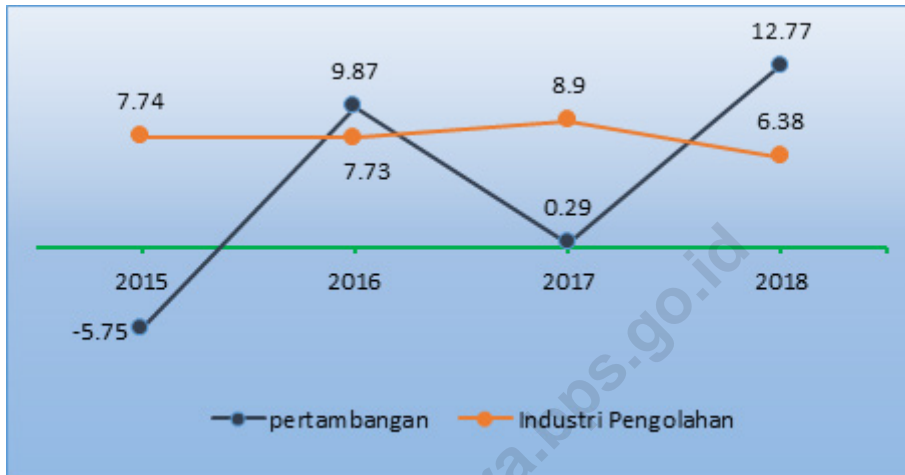
Gambar 3. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja pada sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan (Jiwa) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 – 2018.



Sumber : BPS (Survei Angkatan Kerja)

Demikian pula pertumbuhan ekonomi pada sisi lapangan usaha meskipun berfluktuasi tetapi masih tetap menunjukkan tren yang positif. Bahkan pada tahun 2018 industri pertambangan mampu tumbuh 12,77 persen. Sedangkan Industri pengolahan secara umum mengalami penurunan 6,38 persen namun sektor industri pengolahan logam dasar tetap meningkat seiring meningkatnya investasi dan produksi disektor tersebut.

Gambar 4. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja pada sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan (Jiwa) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 – 2018.



Sumber : BPS

C. Metodologi

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder. Untuk data Realisasi Investasi diperoleh dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara, Sedangkan data jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk menggambarkan keadaan data melalui distribusi frekuensi yang disajikan dalam tabel maupun grafik.

D. Kajian Literatur

Todaro (dalam Sulistiawati, 2012: 35), Investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan semakin memperluas kesempatan kerja.

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 1994). Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output, tetapi juga untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi (Purnamasari, Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, 2017)

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai: perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi

dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa. Barang faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja serta pendidikan menambah ketrampilan mereka. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat penambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh penambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi kerap kali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. (Sukirno, Sadono. 2004. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Arsyad (dalam Sulistiawati, 2012: 36) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, kenaikan pada kemampuan ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan, serta penyesuaian ideologi. Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk peningkatan taraf hidup suatu bangsa yang biasanya diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas.

Keynes dalam Jhingan (2003:) menekankan pentingnya permintaan efektif sebagai faktor utama penggerak perekonomian, dimana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Keynes memandang pemerintah sebagai agen independen yang mampu menstimulasi perekonomian melalui kerja publik. Kebijakan pemerintah yang ekspansioner dapat menaikkan permintaan efektif jika sumber daya dipakai tanpa merugikan konsumsi atau investasi. (Sulistiawati, 2012: 36).

Harrod-Domar dalam Arsyad dalam Sulistiawati (2012: 36) mengembangkan teori Keynes dengan memberi peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai sifat ganda yang dimiliki oleh investasi. Pertama, investasi menciptakan pendapatan (merupakan dampak dari permintaan investasi) dan kedua, investasi memperbesar kapasitas perekonomian dengan cara meningkatkan stok kapital (merupakan dampak dari penawaran investasi).

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya adalah besar. Menurut Todaro dalam Sulistiawati (2012 : 37), model ekonomi ketenagakerjaan yang berkaitan dengan investasi, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja adalah Model Makro Output – Kesempatan kerja (output employment macro model) yang berfokus pada hubungan antara akumulasi modal, pertumbuhan output industri, dan penciptaan lapangan kerja. Perhatian utama dari model pertumbuhan ini adalah pada kebijakan untuk meningkatkan output nasional melalui akumulasi modal. Model ini menghubungkan tingkat penyediaan kesempatan kerja dengan tingkat pertumbuhan PDB/PDRB, sehingga model ini mengisyaratkan bahwa dengan memaksimalkan pertumbuhan PDB/PDRB-nya, suatu negara dapat memaksimumkan penyerapan tenaga kerja.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia adalah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimal. Jadi setiap orang atau penduduk yang sudah berusia 10 tahun keatas tergolong tenaga kerja.

Tenaga kerja terdiri dari 2 kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia

kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yaitu orang-orang yang kegiatannya sekolah, menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (Dumairy, 1996)

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian deskriptif pada kajian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Investasi sektor Industri Logam dasar di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara khusus disektor tersebut.
- b. Pertumbuhan investasi pada sektor industri logam dasar Provinsi Sulawesi Tenggara disinyalir ikut mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut.

F. Referensi

- Ardra.Biz, 2019. Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. [https://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-makro/pengaruh-investasi-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-suatu-negara/Suatu Ekonomi](https://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-makro/pengaruh-investasi-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-suatu-negara/Suatu%20Ekonomi) (Diakses November 2019)
- Badan Pusat Statistik, 2019. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Pengeluaran 2014 -2018. Sulawesi Tenggara : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara
- Bank Indonesia, Mei 2019. Laporan Perekonomian Sulawesi Tenggara. www.bi.go.id/web/id/publikasi/
- Purnamasari, Sri Ayuni. 2017. "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo. Kendari.
- Sukirno, Sadono. 2004. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistiawati, Rini. 2012. "Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat". Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura. Pontianak.

TEMA 2. PENGARUH AKSI UNJUK RASA TERHADAP INFLASI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

A. Pendahuluan

Aksi unjuk rasa adalah suatu kegiatan menyampaikan aspirasi atau menentang kebijakan suatu pihak, baik itu organisasi atau pemerintah, dimana kegiatan tersebut merupakan upaya penekanan secara politik yang dilakukan oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Hal tersebut adalah bentuk pernyataan protes yang disampaikan secara massal oleh sekelompok orang di tempat umum terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau organisasi. Kegiatan tersebut merupakan satu dari sekian banyak cara untuk menyampaikan pendapat. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat ini juga merupakan implementasi dari demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia. Selain itu, gerakan menyampaikan pendapat atau demonstrasi ini juga diatur di dalam undang-undang negara.

Gejolak unjuk rasa di tanah air seringkali mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan, sehingga mempengaruhi keadaan ekonomi, peningkatan investasi, pertumbuhan daya saing masyarakat dan pemerataan pembangunan ekonomi. Kepastian hukum kerap disebut sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Apalagi, jika demonstrasi berakhir rusuh dan merusak sejumlah fasilitas umum. Hal tersebut jika terjadi berkepanjangan tentu dapat mengakibatkan perlambatan pada pertumbuhan ekonomi bahkan resesi.

Aksi unjuk rasa di beberapa kota di Indonesia terutama di kuartal ketiga tahun 2019 dipicu oleh protes terhadap pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perubahan dalam pasal RUU KUHP yang dianggap cukup kontradiktif dengan situasi yang terjadi. Setidaknya, ada 8 pasal kontroversial yang memicu aksi demonstrasi terjadi. Sedangkan revisi UU KPK dianggap sebagian besar pengunjuk rasa sarat kepentingan dan justru akan melemahkan lembaga anti rasuah. Ada 15 pasal yang dianggap akan melemahkan peran KPK memberangus korupsi.

Beberapa elemen masyarakat dan mahasiswa di Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari tidak luput dari aksi protes ini. Unjuk rasa dilatarbelakangi oleh berbagai hal dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan keamanan. Berdasarkan data dari Kepolisian Resort Kota Kendari, tercatat aksi unjuk rasa di tahun 2019 adalah 271 aksi. Angka ini relatif lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 363 aksi. Walaupun demikian, aksi pada tahun 2019 dinilai lebih sering menimbulkan kericuhan bahkan bentrok dengan aparat kepolisian.

Gejolak aksi unjuk rasa di Kota Kendari sangat meresahkan masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Peristiwa tersebut tentu diharapkan tidak membawa dampak negatif pada ekonomi terutama kenaikan harga barang dan jasa atau disebut inflasi. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh atau hubungan banyaknya aksi unjuk rasa yang terjadi dengan indeks harga konsumen atau inflasi di Kota Kendari.

B. Metodologi

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data inflasi/IHK bulanan oleh Badan Pusat Statistik dan data jumlah aksi demonstrasi yang terjadi berdasarkan data Kepolisian Resort Kota Kendari. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan inferensia. Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk menggambarkan keadaan data melalui distribusi frekuensi yang disajikan dalam tabel atau grafik. Sedangkan analisis statistik inferensia ditujukan untuk menarik kesimpulan terhadap gugus data dengan melakukan uji statistik. Dalam kajian

kali ini uji statistik yang digunakan adalah analisis korelasi bevariate pearson.

Analisis korelasi bevariate pearson adalah studi pembahasan tentang derajat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Adapun hipotesis yang digunakan adalah:

Ho : Tidak ada pengaruh antara banyaknya aksi unjuk rasa yang terjadi dengan inflasi kota kendari

Ha : Terdapat pengaruh antara banyaknya aksi unjuk rasa yang terjadi dengan inflasi kota kendari

C. Kajian Literatur

Inflasi sendiri merupakan sebuah proses dimana terjadi kenaikan harga barang secara terus menerus. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh pada perekonomian negara dan menimbulkan dampak inflasi yang signifikan. Inflasi menjadi salah satu indikator perhitungan dalam pertumbuhan ekonomi sebuah daerah atau negara. Setiap negara mendorong agar angka inflasi mereka sekecil mungkin, sehingga tentunya berbagai upaya di lakukan untuk dapat mencapai angka minimal tersebut.

Tentu inflasi tidak terjadi begitu saja, namun kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor yang ada. Daya beli masyarakat yang menurun akibat dari penurunan nilai mata uang. Sehingga tingkat perekonomian dan transaksi jual beli dan perputaran uang dalam negeri semakin melemah. Tidak ada sebab tanpa akibat. Artinya bahwa inflasi tidak terjadi begitu saja tanpa ada faktor penyebabnya. Karenanya dengan meminimalkan faktor penyebab maka sudah tentu inflasi akan bisa dicegah dan di tekan angkanya.

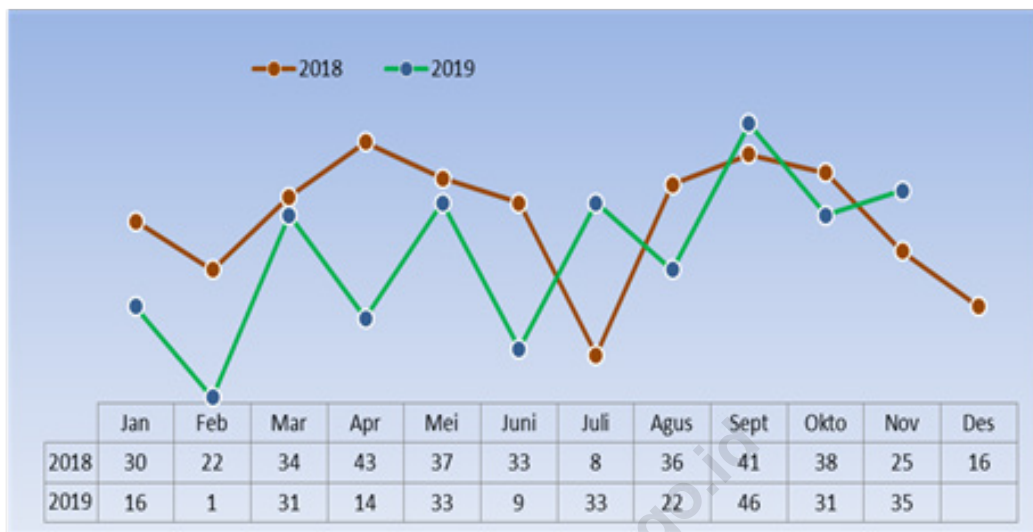
Adapun faktor penyebab inflasi antara lain : (1) permintaan barang dan jasa yang meningkat, (2) Bertambahnya uang yang beredar, (3) Kenaikan biaya produksi, (4) Kenaikan barang dalam negeri, (5) Tuntutan kenaikan upah kerja, dan (6) Kekacauan politik dalam negeri.

Indeks Harga Konsumen (IHK) sendiri adalah nomor indeks yang dapat menghitung harga rata-rata barang dan jasa yang telah dikonsumsi oleh konsumen. Biasanya suatu negara menggunakan IHK untuk mengukur tingkat inflasi yang terjadi, selain itu dapat menjadi pertimbangan dalam menyesuaikan gaji, upah, dana pensiun, dan kontrak lainnya.

D. Unjuk Rasa dan Inflasi di Kota Kendari

Seperti dijelaskan diatas bahwa inflasi dapat disebabkan oleh kekacauan politik dan keamanan dalam negeri. Berdasarkan data dari Kepolisian Resort Kota Kendari diperoleh data aksi unjuk rasa tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Gambar 5. Jumlah Aksi Unjuk Rasa Kota Kendari 2018 dan 2019

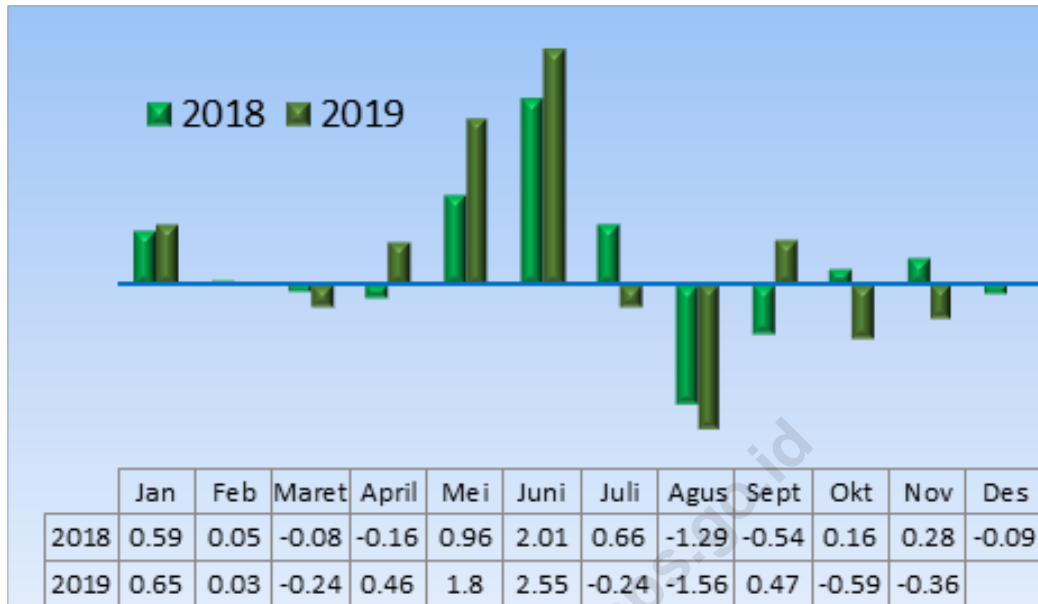


Sumber : BPS

Meskipun unjuk rasa terjadi di sepanjang tahun 2018 – 2019, namun aksi yang berujung kekacauan dan bentrok terjadi di bulan September 2019. Dikutip dari sultrakini.com tanggal 27 September 2019, kerugian pada puncak unjuk rasa tanggal 26 September 2019 diperkirakan mencapai 1,5 milyar rupiah. Hal tersebut belum termasuk fasilitas umum seperti halte, traffic light, dan kendaraan dinas yang dirusak oleh massa aksi.

Adapun inflasi di Kota Kendari tahun 2019 menunjukkan grafik yang fluktuatif. Jika inflasi 2019 disandingkan dengan data inflasi tahun 2018 cenderung mengalami tren yang tidak jauh berbeda. Akan tetapi di bulan April, Juli, September, Oktober dan November terjadi perbedaan arah, di satu sisi terjadi inflasi namun disisi yang lain terjadi deflasi (yoy). Nampak di bulan September 2019 inflasi sebesar 0,47 % sedangkan September 2018 justru mengalami deflasi sebesar -0,54 %.

Gambar 6. Inflasi Kota Kendari Tahun 2018 hingga 2019



Sumber : BPS

E. Hasil dan Pembahasan

Telah diketahui bahwa tahun 2019 terjadi gejala unjuk rasa yang berujung bentrok dan mengakibatkan kerusakan pada beberapa infrastruktur dan fasilitas umum. Meskipun demikian berdasarkan Analisis Korelasi Bivariate Pearson diperoleh hasil bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel jumlah unjuk rasa dan variabel inflasi maupun dengan variabel Indeks Harga Konsumen (IHK). Dilihat dari Pearson Correlation (r) diperoleh korelasi antara variabel jumlah unjuk rasa dengan variabel inflasi maupun variabel IHK sangat lemah (mendekati nol) dan terdapat korelasi yang berlawanan arah. Dengan demikian, analisis ini menyimpulkan bahwa H_0 di terima dan H_a ditolak.

Pada Gambar 6 terlihat bahwa terjadi peningkatan inflasi di bulan September 2019. Meskipun pada bulan tersebut terjadi unjuk rasa yang rusuh namun tidak dapat disimpulkan bahwa hal tersebut mempengaruhi kenaikan inflasi. Hal ini karena data yang tersedia adalah jumlah unjuk rasa bukan tingkat kerusuhan unjuk rasa yang terjadi. Secara keseluruhan aksi unjuk rasa yang terjadi dua tahun terakhir cenderung aman dan kondusif.

F. Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan tidak ada pengaruh antara jumlah aksi unjuk rasa yang terjadi dengan naik turunnya inflasi dan indeks harga konsumen kota kendari. Pengaruh tersebut mungkin akan lebih nampak jika data yang digunakan adalah besar kecilnya kerusakan/kerusuhan akibat aksi unjuk rasa.

G. Referensi

Author, 2018. 15 faktor penyebab inflasi yang perlu diketahui: <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/faktor-penyebab-inflasi>

- Badan Pusat Statistik, 2019. Inflasi Kota kendari tahun 2018 dan 2019 <https://sultra.bps.go.id/site/pilihdata.html>
- Raharjo, Sahid. 2019. Cara Melakukan Analisis Korelasi Bivariate Pearson dengan SPSS : <https://www.spssindonesia.com/2014/02/analisis-korelasi-dengan-spss.html>. (diakses 5 Desember 2019)
- Tamrin, Hasrul. 2019. Sekwan DPRD Sultra: Kerugian Akibat demonstrasi capai 1,5 miliar. www.sultrakini.com (diakses 4 Desember 2019)

H. Lampiran

Analisis Korelasi Bevariate Pearson.

Ho: Tidak ada pengaruh antara banyaknya aksi unjuk rasa yang terjadi dengan inflasi kota kendari

Ha: Terdapat pengaruh antara banyaknya aksi unjuk rasa yang terjadi dengan inflasi kota kendari

Koefisien korelasi atau Pearson Correlation memiliki nilai paling kecil -1 dan paling besar +1.

1. Berkenaan dengan besaran angka ini, jika 0 maka artinya tidak ada korelasi sama sekali sementara jika korelasi 1 berarti ada korelasi sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mendekati 1 atau -1 maka hubungan antara dua variabel adalah semakin kuat. Sebaliknya, jika nilai r atau pearson correlation mendekati 0 berarti hubungan dua variabel menjadi semakin lemah. Dapat pula dikatakan bahwa jika angka korelasi diatas 0,5 maka menunjukkan korelasi yang cukup kuat sedangkan jika di bawah 0,5 maka menunjukkan korelasi yang lemah.
2. Selain besarnya korelasi, tanda korelasi juga berpengaruh pada penafsiran hasil dalam analisis ini. Dimana, tanda negatif (-) pada tabel output SPSS menunjukkan adanya arah yang berlawanan, sedangkan tanda positif (+) menunjukkan arah yang sama atau korelasi searah.

Dasar pengambilan keputusan.

Ada tiga cara yang dapat kita gunakan sebagai pedoman atau dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi bivariate pearson ini yaitu pertama dengan melihat nilai sig. (2-tailed). Kedua membandingkan nilai r hitung (Pearson Correlation) dengan nilai r tabel product momen. Ketiga adalah dengan melihat tanda bintang (*) yang terdapat pada output program SPSS.

1. Berdasarkan Nilai Signifikansi Sig. (2-tailed) : Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 maka terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Sebaliknya jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05 maka tidak terdapat korelasi.
2. Berdasarkan Nilai r hitung (Pearson Correlation) : Jika nilai r hitung > r tabel maka ada korelasi antar variabel. Sebaliknya jika nilai r hitung < r tabel maka artinya tidak ada korelasi antar variabel.
3. Berdasarkan Tanda Bintang (*) yang diberikan SPSS : Jika terdapat tanda bintang (*) atau (**) pada nilai pearson correlation maka antara variabel yang di analisis terjadi korelasi. Sebaliknya jika tidak terdapat tanda bintang pada nilai pearson correlation maka antara variabel yang di analisis tidak terjadi korelasi.

Hasil uji korelasi antara variabel jumlah unjuk rasa dan variabel inflasi.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Unjuk Rasa	27.5652	12.05226	23
Inflasi	.2400	.95698	23

Correlations

		Unjuk Rasa	Inflasi	IHK
Unjuk Rasa	Pearson Correlation	1	-.207	-.147
	Sig. (2-tailed)		.344	.503
	N	23	23	23
Inflasi	Pearson Correlation	-.207	1	.146
	Sig. (2-tailed)	.344		.507
	N	23	23	23
IHK	Pearson Correlation	-.147	.146	1
	Sig. (2-tailed)	.503	.507	
	N	23	23	24

TEMA 3. Dampak Bencana Banjir 2019 terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Tenggara

A. Pendahuluan

Bencana alam dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Peredaran uang, konsumsi rumah tangga dan produktivitas ekonomi secara keseluruhan diprediksi melambat pasca terjadinya bencana. United Nations Disaster Relief Coordinator (UNDRCO, 1991) menegaskan bahwa bencana dalam kelompok sudden-onset disasters (badai, tsunami, gempa bumi, dan banjir) utamanya akan menghancurkan modal produktif dan infrastruktur. Bencana yang masuk dalam kategori slow-onset disasters (kekeringan dan banjir) dampaknya lebih luas dan berjangka panjang, menurunkan tingkat tabungan masyarakat, investasi, permintaan domestik secara agregat, dan menurunkan kapasitas produksi. Sementara kelompok compound disasters (aktivitas vulkanik) akan menimbulkan keadaan darurat kemanusiaan yang kompleks.

Turunnya kondisi perekonomian disebabkan oleh ketersediaan lapangan usaha yang makin sedikit, dimana ketersediaan lapangan usaha dipengaruhi oleh bencana alam yang terjadi. Menurut Franita (2016), kurangnya ketersediaan lapangan usaha atau kerja adalah salah satu factor penyebab terjadinya pengangguran. Peristiwa bencana banjir yang terjadi pada bulan juni 2019 setidaknya merusak 6.645,8 hektar lahan produktif di tiga kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara. Data BPS dalam Sulawesi Tenggara Dalam Angka tahun 2019 menyebutkan bahwa dari tiga jenis lapangan pekerjaan utama, sebanyak 35,42% dari 1.2 juta jiwa penduduk usia diatas 15 tahun yang memiliki pekerjaan utama menggantungkan nasib pada usaha pertanian. Dengan rusaknya lahan pertanian maka mengakibatkan hilangnya mata pencaharian masyarakat. Apabila masyarakat petani yang terkena dampak bencana namun tidak memiliki keahlian di bidang-bidang tertentu selain menunggu lahan menjadi produktif kembali dapat mempengaruhi kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tahun 2019 merupakan tahun yang kurang menguntungkan bagi masyarakat provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya bagi masyarakat kabupaten Konawe, Konawe Utara dan Konawe Selatan. Tiga kabupaten tersebut mengalami banjir yang terbilang parah dengan kerugian masing-masing kabupaten mencapai Rp. 226 Milyar untuk kabupaten Konawe, Rp. 674 Milyar untuk kabupaten Konawe Utara, dan Rp. 19 Milyar untuk kabupaten Konawe Selatan. Dampak bencana banjir ini tentunya berimbas terhadap kondisi ketenagakerjaan di provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Gambaran Umum Wilayah Bencana

1. Kabupaten Konawe Utara

Gambar 7. Peta Kabupaten Konawe Utara



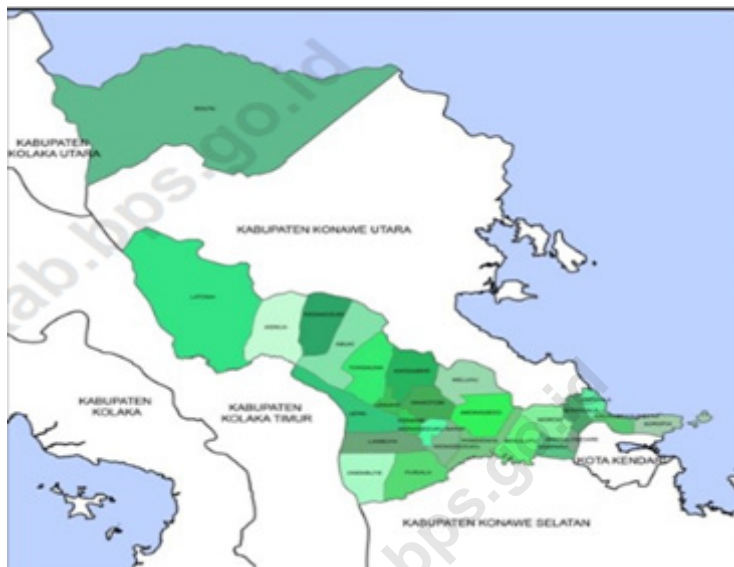
Sumber : BPS

Kabupaten Konawe Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Konawe, yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kabupaten Konawe Utara. Luas wilayah Kabupaten Konawe Utara yaitu 5.101,76 Km² atau 13,40 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Asera dengan perkiraan sekitar 16,92 persen dari total luas Kabupaten Konawe Utara. Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 13 kecamatan dengan kecamatan terjauh yaitu Lasolo Kepulauan dari ibukota Kabupaten (Wanggudu) yang berada di Kecamatan Asera.

Kabupaten Konawe Utara yang memiliki beberapa sungai besar seperti sungai Lasolo, sungai Kokapi, sungai Toreo, sungai Andumowu, sungai Molawe, sungai Lembo dan sungai Linomoyo tentunya selain berpotensi untuk pengembangan pertanian, irigasi maupun pembangkit tenaga listrik, tentunya juga berpotensi banjir. Melansir BPNB, banjir di Konawe Utara terjadi hampir setiap tahunnya, tetapi banjir terparah adalah banjir yang terjadi pada Juni 2019. Banjir ini merendam 6 kecamatan dari total 13 kecamatan dengan kerugian mencapai Rp. 674 Milyar. Enam kecamatan yang terdampak, yaitu Asera dengan jumlah korban terdampak banjir sebanyak 2.357 jiwa yang tersebar di 13 desa dan 1 kelurahan, Andowia sebanyak 1.665 jiwa yang tersebar di 4 desa dan 1 kelurahan, Oheo dengan jumlah korban 973 jiwa yang tersebar di 14 desa dan 1 kelurahan, Wiwirano dengan jumlah korban 456 jiwa yang tersebar di 4 desa, Landawe dengan jumlah korban 371 jiwa yang tersebar di 5 desa serta Langgikima dengan jumlah korban 66 jiwa yang bermukim di 1 desa. Selain mengakibatkan korban terdampak banjir, banjir yang terjadi pada bulan Juni 2019 juga mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana umum seperti rumah, sekolah, puskesmas, jembatan dll serta lahan pertanian dan persawahan (bnpb.go.id).

2. Kabupaten Konawe

Gambar 8. Peta Kabupaten Konawe

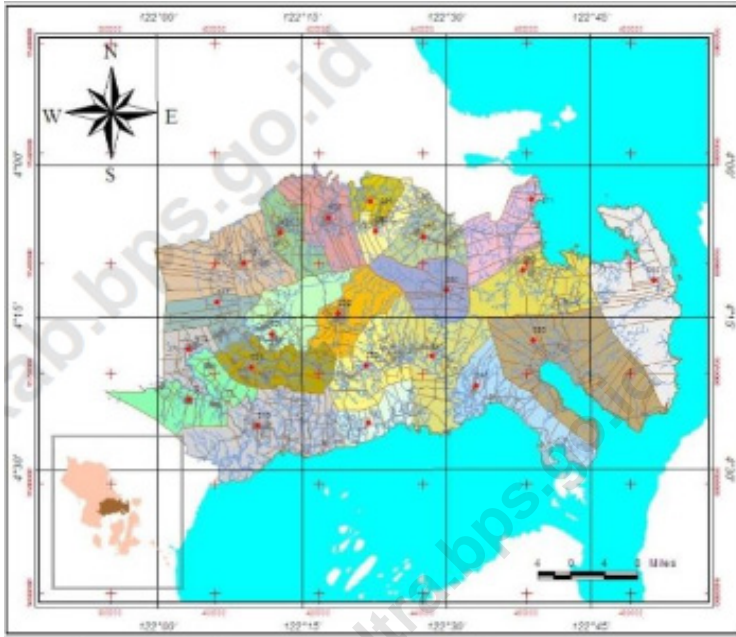


Sumber : BPS

Kabupaten Konawe dengan ibukotanya Unaaha, berjarak 73 km dari Kota Kendari. Kabupaten Konawe dilintasi oleh beberapa sungai besar yakni sungai Konaweaha, sungai Rawa Aopa dan sungai Lahumbuti. Banjir yang terjadi pada juni 2019 disebabkan karena luapan air dari tiga sungai ini. Dampak bencana banjir ini dirasakan oleh 5.847 kepala keluarga atau 22.573 jiwa, rumah terendam 4.688 unit, rumah rusak 1.280 unit, sekolah rusak 95 unit, dan kerusakan dari sektor pertanian serta perkebunan dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp. 226 milyar (Antara).

3. Kabupaten Konawe Selatan

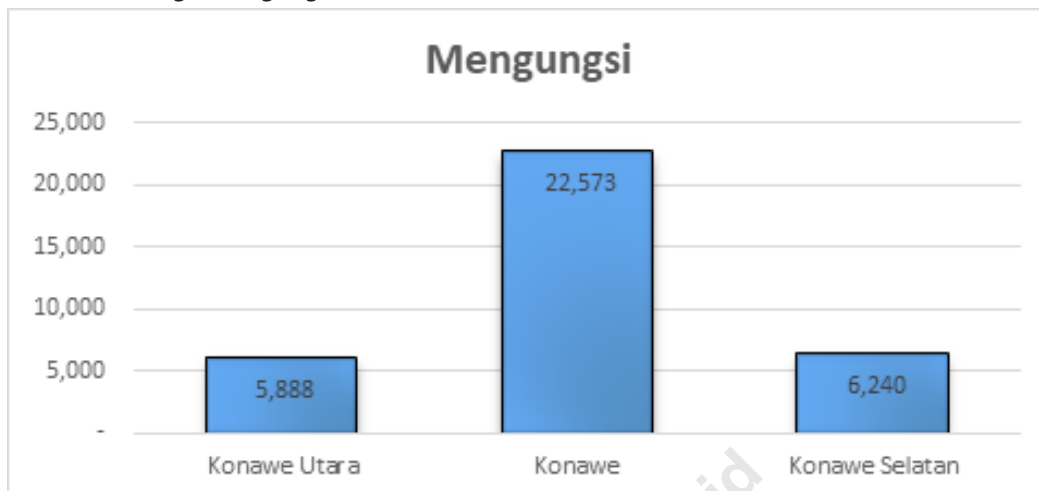
Gambar 9. Peta Kabupaten Konawe Selatan



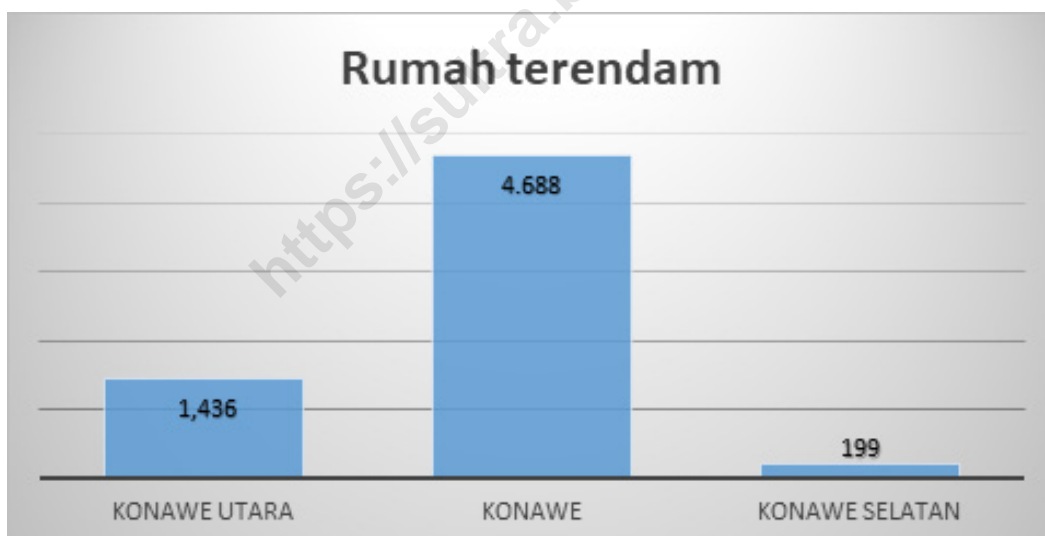
Sumber: BPS Kabupaten Konawe Selatan

Kabupaten Konawe Selatan sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ibu kota Andoolo, secara geografis terletak dibagian Selatan Khatulistiwa. Letak astronominya antara 30.58.56' dan 4.031.52' Lintang Selatan serta 121.58' dan 123.16' Bujur Timur. Luas wilayah daratan Kabupaten Konawe Selatan, 451.420 Ha atau 11,83 persen dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan (laut) ± 9.368 Km². Kabupaten Konawe Selatan dilintasi oleh dua sungai yaitu sungai Roraya dan sungai Anggotawe. Berdasarkan data BNPB, Konawe Selatan merupakan salah satu daerah langganan banjir di provinsi Sulawesi Tenggara, dimana hampir terjadi setiap tahunnya bahkan daerah ini pernah dilanda tiga kali banjir pada tahun yang sama yaitu tahun 2010. Bencana banjir terakhir terjadi pada juni 2019 dengan kerugian ditaksi Rp. 19 milyar. Banjir yang terjadi di beberapa kecamatan ini mengakibatkan kerusakan rumah 199 unit, warga mengungsi sebanyak 6.240 jiwa, lahan pertanian yang rusak seluas 1.059 ha, perkebunan 49 ha dan perikanan tambak seluas 65 ha (suara.com).

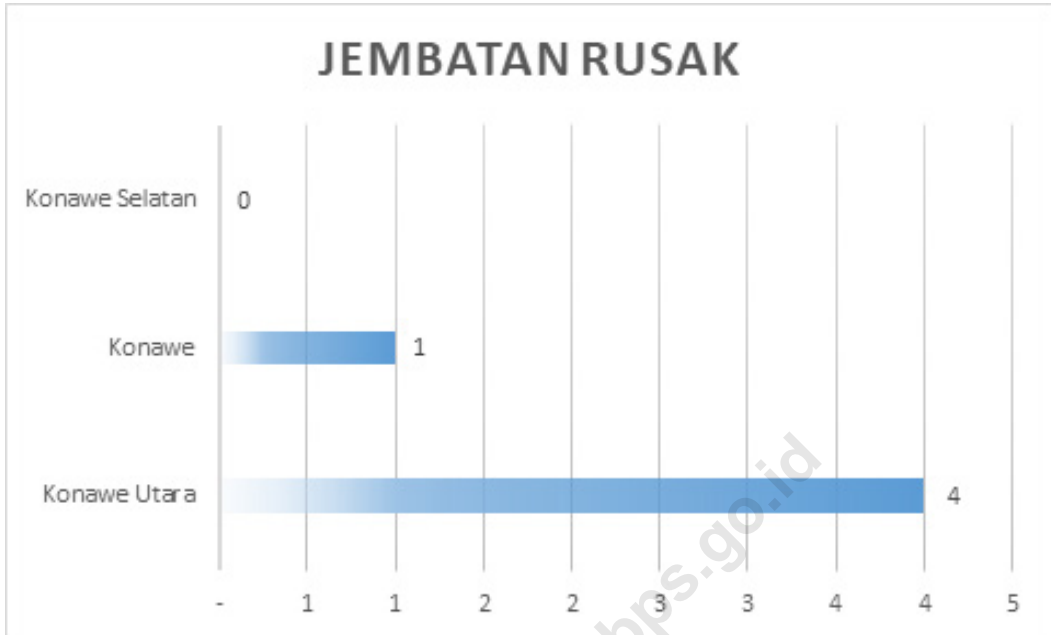
Gambar 10. Angka Pengungsi (Jiwa)



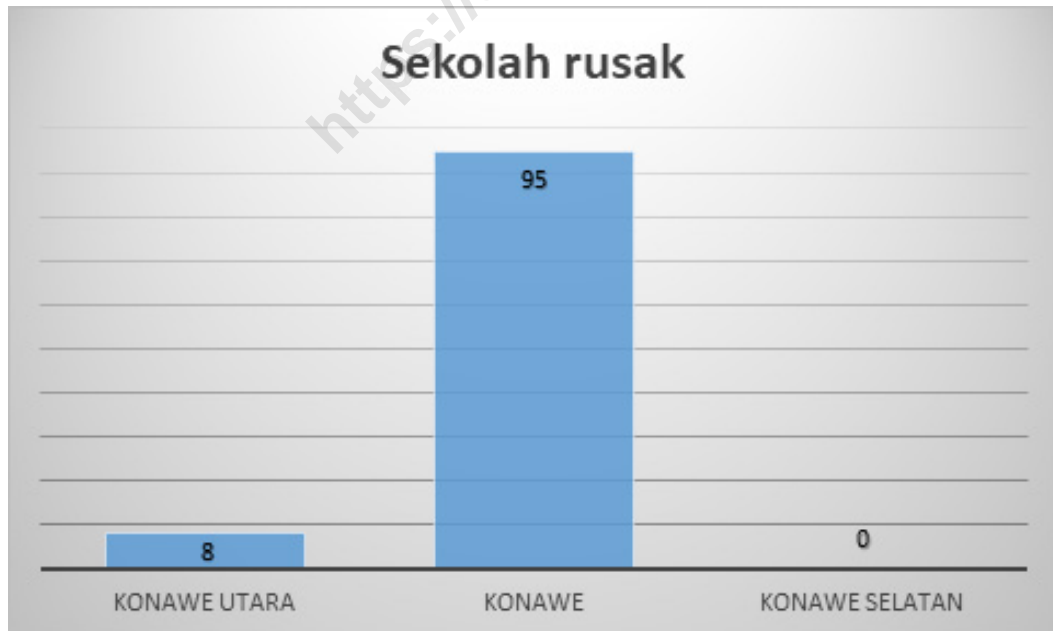
Gambar 11. Angka Kerusakan Rumah (Unit)



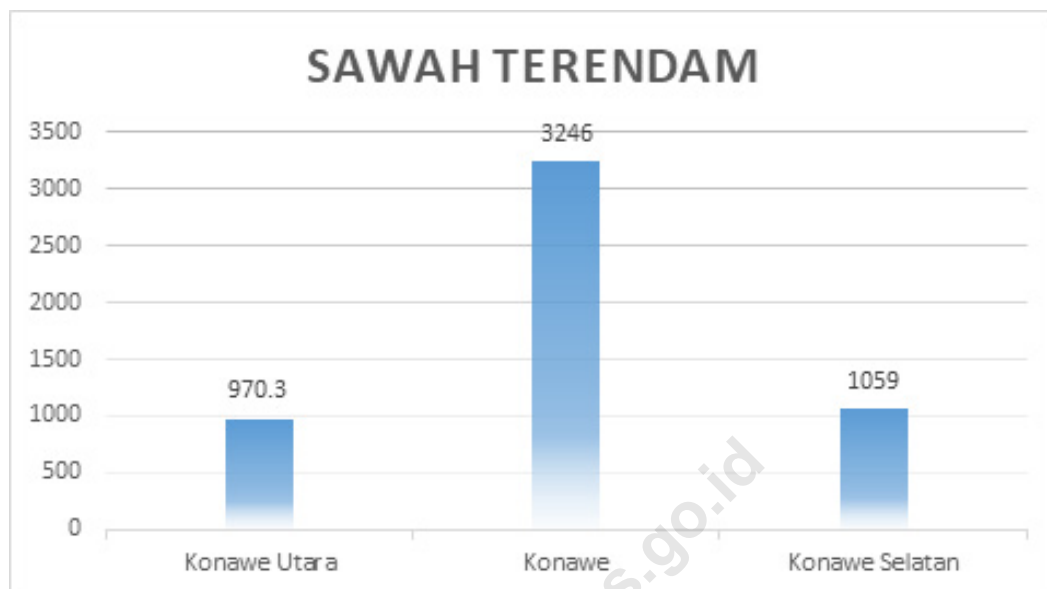
Gambar 12. Angka Kerusakan Jembatan (Unit)



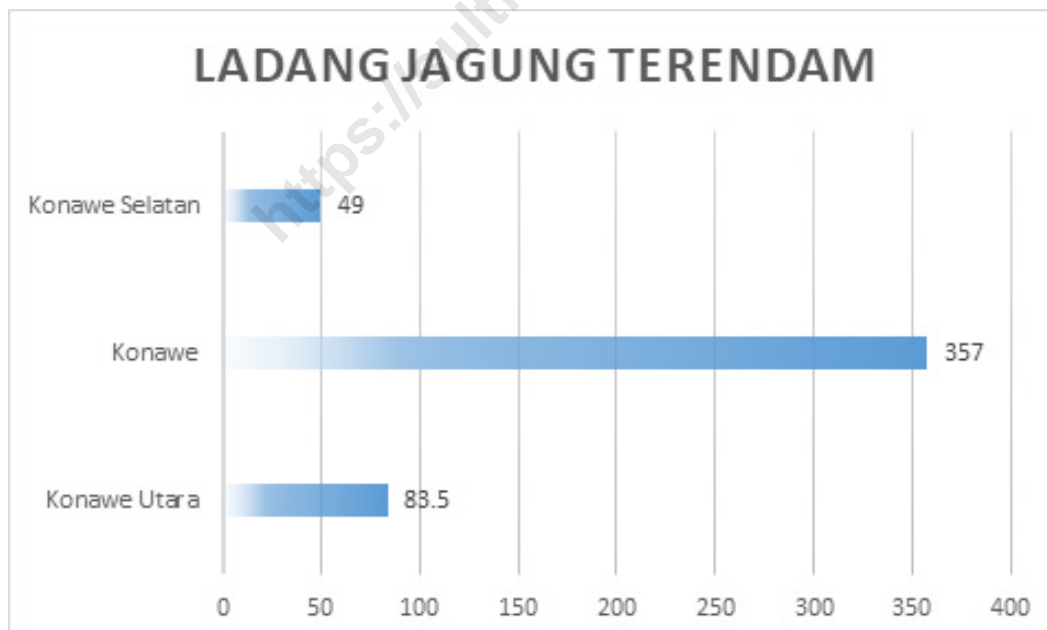
Gambar 13. Angka Kerusakan Sekolah (Unit)



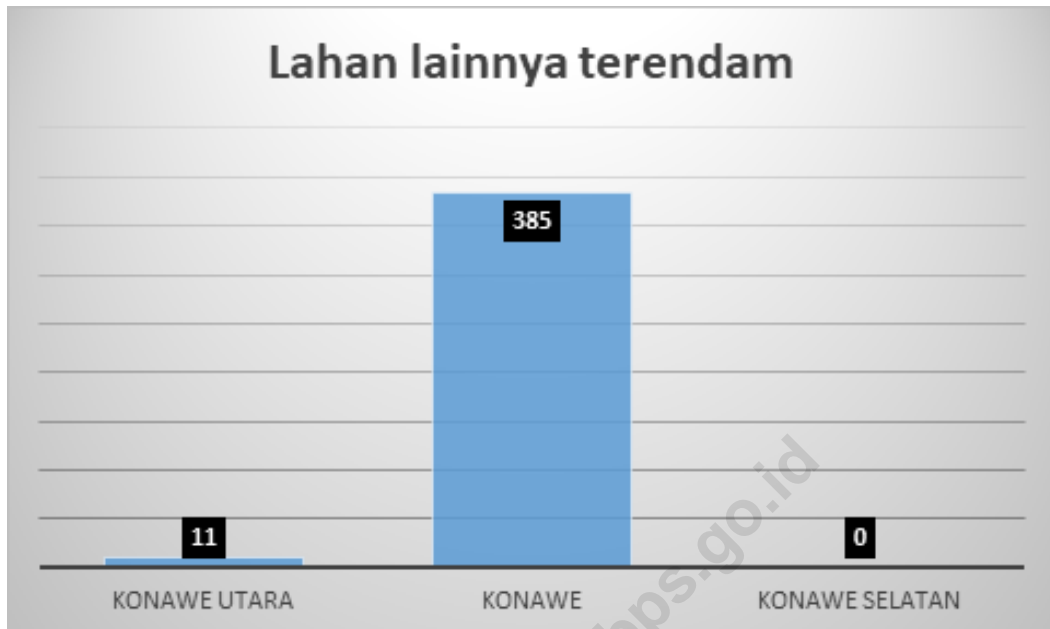
Gambar 14. Angka Kerusakan Lahan Pertanian (Hektar)



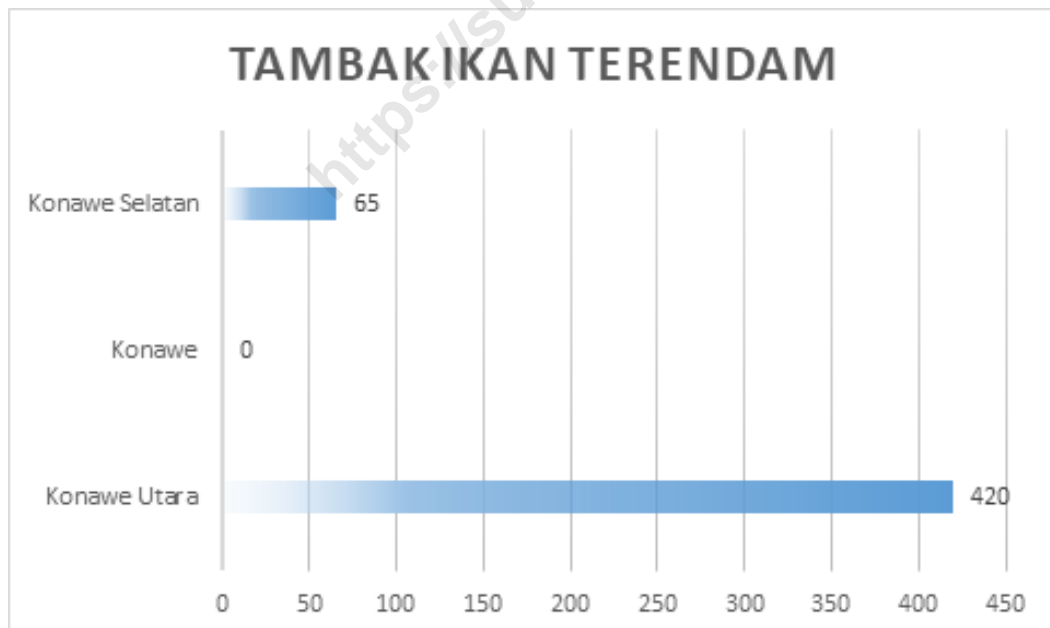
Gambar 15. Angka Kerusakan Lahan Jagung (Hektar)



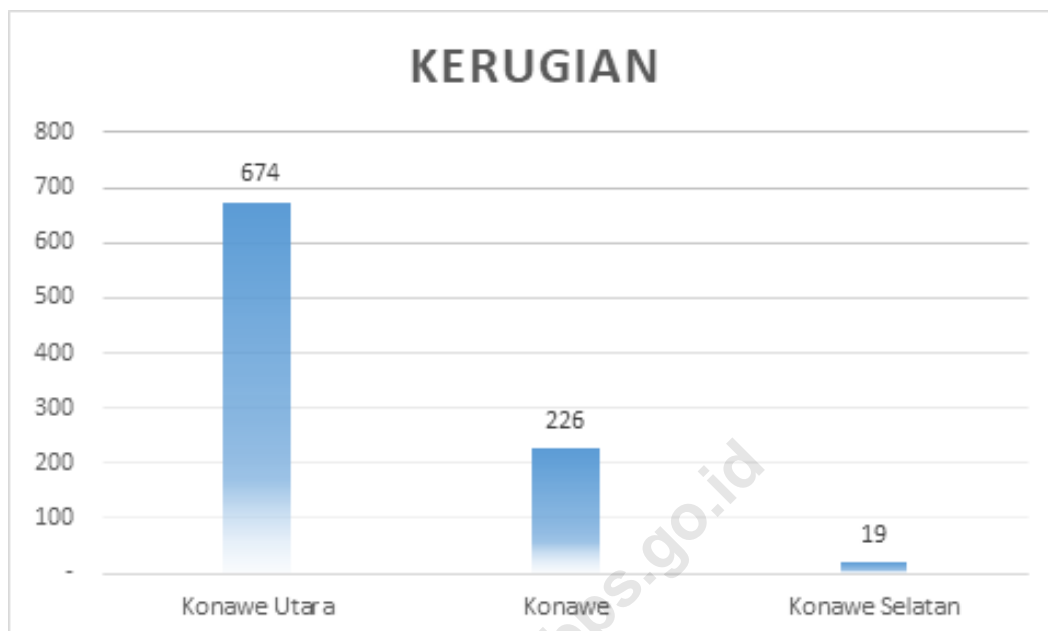
Gambar 16. Angka Kerusakan Lahan Lain (Hektar)



Gambar 17. Angka Kerusakan Tambak (hektar)



Gambar 18. Angka Kerugian (Milyar Rupiah)



C. Metode Analisis Data

Uji Wilcoxon merupakan alternatif dari uji-t sampel berpasangan. Uji tersebut bertujuan untuk menguji antara dua kelompok data yang saling berpasangan dan tidak memenuhi asumsi normalitas. Dalam penelitian ini, Uji Wilcoxon dilakukan untuk menguji data TPT sebelum dan sesudah terjadinya bencana banjir untuk kelompok sampel yang sama. Hipotesis yang digunakan pada uji Wilcoxon adalah sebagai berikut (Siegel, 1986):

$$H_0: TPT_{2018} - TPT_{2019} = 0$$

$$H_1: TPT_{2018} - TPT_{2019} \neq 0$$

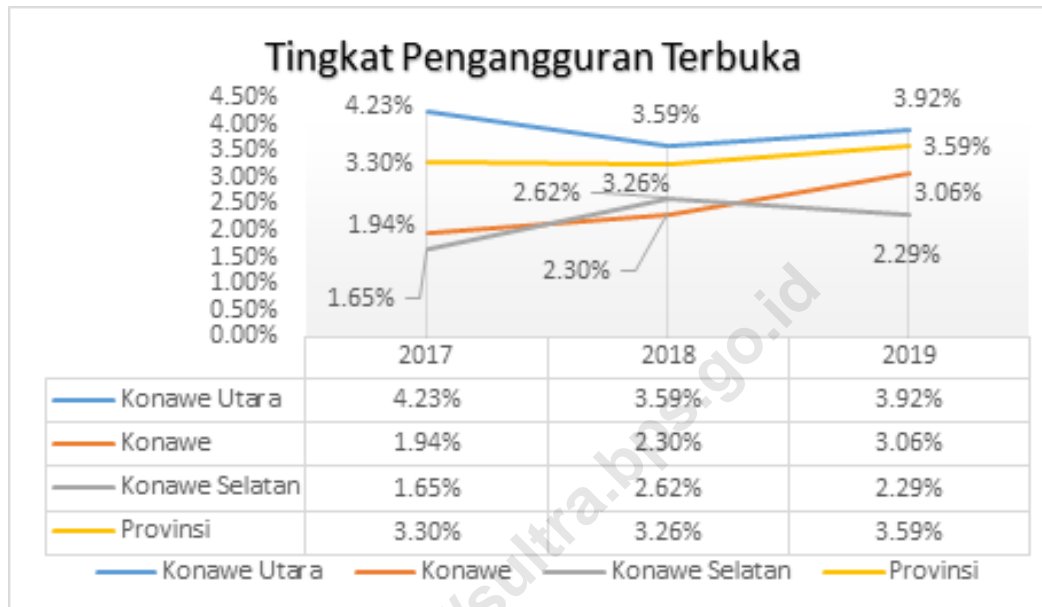
Hipotesis ini menguji Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019 untuk setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Apabila H_0 diterima, berarti tidak ada perubahan yang signifikan antara TPT sebelum dan sesudah terjadinya bencana banjir. Sedangkan apabila H_0 ditolak, berarti terdapat perubahan yang signifikan antara TPT sebelum dan sesudah terjadinya bencana banjir.

D. Analisis

Bencana banjir yang terjadi kemungkinan memiliki hubungan terhadap kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau belum terserap oleh pasar kerja. Untuk Kabupaten Konawe Utara, pada Agustus 2019 terjadi kenaikan TPT sebesar 0,33 poin dibanding Agustus 2018 setelah Agustus tahun sebelumnya turun sebesar 0,64 poin dibanding Agustus 2017. Untuk Kabupaten Konawe, pada Agustus 2019 terjadi kenaikan TPT sebesar 0,76 poin dibanding Agustus 2018 setelah Agustus yang tahun sebelumnya hanya naik sebesar 0,36 poin dibanding Agustus 2017, dengan kata lain terjadi kenaikan dua kali lipat pada tahun 2019. Kondisi pada dua kabupaten sebelumnya berbanding terbalik dengan kondisi pada kabupaten Konawe Selatan. Untuk Kabupaten Konawe Selatan, pada Agustus 2019 terjadi penurunan TPT sebesar 0,33 poin dibanding Agustus 2018 setelah

agustus tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar 0,97 poin dibanding Agustus 2017. Bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tenggara periode 2017 – 2019, pada Agustus 2019 terjadi kenaikan TPT sebesar 0,33 poin dibanding Agustus 2018 setelah agustus tahun sebelumnya turun sebesar 0,04 poin dibanding Agustus 2017.

Gambar 19. Angka TPT 3 Kabupaten dan Provinsi



Sumber : BPS

Untuk mengetahui dampak bencana banjir yang terjadi di tiga kabupaten terhadap tingkat pengangguran terbuka provinsi Sulawesi Tenggara, digunakan uji Wilcoxon. Hasil yang diperoleh adalah adanya perbedaan antara tingkat pengangguran terbuka tahun sebelumnya dengan tahun 2019. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil pengujian antara data TPT tahun 2017 dan 2018, dimana pada kedua tahun tersebut tidak ada kejadian luar biasa seperti yang terjadi pada tahun 2019, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan antara TPT tahun 2017 dan TPT tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa bencana banjir yang terjadi di tahun 2019 sedikit banyak mempengaruhi perubahan status ketenaga kerjaan di provinsi Sulawesi Tenggara.

E. Kesimpulan

1. Bencana banjir yang terjadi pada tahun 2019 adalah bencana terbesar dalam 10 tahun terakhir dengan total kerugian mencapai Rp. 919 Milyar.
2. Terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 sebesar 0,33 poin untuk kabupaten Konawe Utara dan 0,76 poin untuk kabupaten Konawe. Hal ini berbanding terbalik dengan Konawe Selatan yang terjadi penurunan sebesar 0,33 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa bencana banjir yang terjadi memiliki hubungan dengan kenaikan persentase tingkat pengangguran terbuka di provinsi Sulawesi Tenggara.

F. Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2017). Keadaan Ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara Agustus 2017. Berita Resmi Statistik, No. 63/11/Th. XI, 6 November 2017
- Badan Pusat Statistik. (2018). Keadaan Ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara Agustus 2018. Berita Resmi Statistik, No. 64/11/74/Th. XII, 5 November 2018
- Badan Pusat Statistik. (2019). Keadaan Ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara Agustus 2019. Berita Resmi Statistik, No. 63/11/74/Th. XII, 5 November 2019
- Badan Pusat Statistik. (2019). Kabupaten Konawe Dalam Angka 2019. Kendari: BPS
- Badan Pusat Statistik. (2019). Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka 2019. Kendari: BPS
- Badan Pusat Statistik. (2019). Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka 2019. Kendari: BPS
- Franita, Riska (2016, Desember). Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial): Analisa Pengangguran Indonesia. ISSN 2541-657X
- Tirto.id (2019, Juni 19). Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/kerugian-akibat-banjir-di-konawe-utara-capai-rp-6748-miliar-ecTx>
- Suara.com (2019, Juni 19). <https://www.suara.com/news/2019/06/19/125627/bnpb-5847-kk-terdampak-banjir-konawe-sulteng>
- suara.com (2019, Juni 18). <https://www.suara.com/bisnis/2019/06/18/140351/banjir-konawe-selatan-timbulkan-kerugian-hingga-rp-1942-miliar>

G. Lampiran

Lampiran Uji Wilcoxon :

Uji Wilcoxon Signed Rank Test merupakan uji alternatif dari uji pairing t test atau t paired apabila tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini dikenal juga dengan istilah Wilcoxon Match Pair Test. Pengujian dilakukan dua kali, yakni pengujian data tahun 2017 dan 2018 serta data tahun 2018 dan 2019. Hipotesis-hipotesis dari penelitian ini adalah :

Ho = tidak ada perubahan signifikan antara TPT tahun 2017 dan tahun 2018

H1 = terdapat perubahan signifikan antara TPT tahun 2017 dan tahun 2018

dan

Ho = tidak ada perubahan signifikan antara TPT tahun 2018 dan tahun 2019

H1 = terdapat perubahan signifikan antara TPT tahun 2018 dan tahun 2019

Dengan dasar pengambilan keputusan :

1. Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0.05, maka Ho ditolak
2. Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0.05, maka H0 diterima

Adapun hasil pengujian pertama adalah :

Tabel 1.7 Hasil Pengujian Uji Wilcoxon Tahap 1

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
2018 - 2017	Negative Ranks	9 ^a	9,00	81,00
	Positive Ranks	8 ^b	9,00	72,00
	Ties	1 ^c		
	Total	18		

a. 2018 < 2017

b. 2018 > 2017

c. 2018 = 2017

Test Statistics ^a	
	2018 - 2017
Z	-,213 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,831

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

Nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0.831 > 0.05 sehingga H0 diterima, sehingga tidak ada perubahan yang signifikan antara tingkat pengangguran terbuka tahun 2017 dan tahun 2018.

Hasil pengujian kedua adalah :

Tabel 1.8 Hasil Pengujian Uji Wilcoxon Tahap 2

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
2019 - 2018	Negative Ranks	5 ^a	8,00	40,00
	Positive Ranks	13 ^b	10,08	131,00
	Ties	0 ^c		
	Total	18		

a. 2019 < 2018

b. 2019 > 2018

c. 2019 = 2018

	2019 - 2018
Z	-1,982 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,047

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

Nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar $0.047 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak, sehingga terdapat perubahan yang signifikan antara tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 dan tahun 2019.

<https://sultra.bps.go.id>

TEMA 4. Pengaruh Pilpres 2019 terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara

A. Pendahuluan

Pemilihan presiden (Pilpres) di Indonesia adalah kontestasi 5 tahunan yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka menjalankan amanat konstitusi 1945. Pilpres secara langsung yang digelar pada April 2019 yang lalu adalah pilpres ke empat kalinya dilaksanakan sejak tahun 2004.

Pilpres yang dilaksanakan sekali dalam 5 tahun tentunya menyedot energi yang signifikan. Perhatian rakyat Indonesia tertuju pada pesta demokrasi tersebut. Sebagian kalangan beranggapan jika Pemilu akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Sebagian lainnya optimis jika Pemilu akan mendorong belanja Pemerintah sehingga akan mendorong kenaikan PDB (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2019). Data PDB menunjukkan pada triwulan I-2019 pengeluaran Pemerintah tumbuh sebesar 5,21 persen. Sementara pada triwulan I-2018 hanya tumbuh 2,71 persen. Untuk provinsi Sulawesi Tenggara sendiri, BPS merilis pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara pada triwulan I 2019 dibanding triwulan I 2018 tumbuh 6,33 persen meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,15 persen.

Beberapa penelitian sebelumnya menyimpulkan jika Pemilu tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian secara massive dalam jangka panjang. Sebagai contoh, Suwaryo (2008) dalam bukunya yang berjudul "Dampak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhadap Abnormal Return Investor" menjelaskan jika tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pemilu. Dengan kata lain, Pemilu sudah dapat diantisipasi pelaku pasar modal. Abnormal return merupakan salah satu alat untuk mengukur reaksi pasar terhadap suatu peristiwa atau berita. Dalam pasar modal yang efisien, harga saham akan bereaksi secara cepat terhadap berita-berita baru yang tidak diduga, sehingga arah gerakannya tidak bisa diprediksi. Di lain pihak, efisiensi pasar modal dikatakan lemah jika tidak sensitif, sehingga memungkinkan terjadi abnormal return (Pandji, 2008).

Sementara itu Imelda, dkk (2014) menyoroti pasar modal secara sektoral selama pilpres 2004, 2009, dan 2014. Hasilnya menunjukkan respons yang berbeda antarsektor. Sektor Pertambangan paling banyak dipengaruhi faktor politik ini, sedangkan sektor perdagangan, jasa, dan investasi tidak terpengaruh. Sedangkan pasar modal secara umum tidak terpengaruh dengan peristiwa politik tersebut. Respons secara sektoral juga dikemukakan oleh Ballester dkk (2010) yang melakukan analisis terhadap dampak Pemilu di Filipina. Dari analisis tersebut disimpulkan bahwa Pemilu di Filipina berdampak positif pada sektor industri saja, sedangkan sektor jasa-jasa dan lainnya tidak merasakan dampaknya. Sementara sektor Pertanian hanya berdampak kecil saja. Dengan kata lain dampak positif pemilu sangat terbatas.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Amru dan Dartanto (2014), yang menjelaskan adanya perubahan yang signifikan beberapa indikator ekonomi makro seperti konsumsi, investasi, jumlah uang beredar, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelum dan sesudah Pemilu tahun 2014. Namun demikian, perubahannya hanya dalam jangka pendek melalui penciptaan kesempatan kerja pada aktivitas ekonomi yang berkaitan saja. Selain itu pemilu juga mendorong peningkatan konsumsi, investasi, dan jumlah uang beredar.

BPS merilis pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara pada triwulan III 2019 dibanding triwulan II 2019 tumbuh 3,67 persen melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh

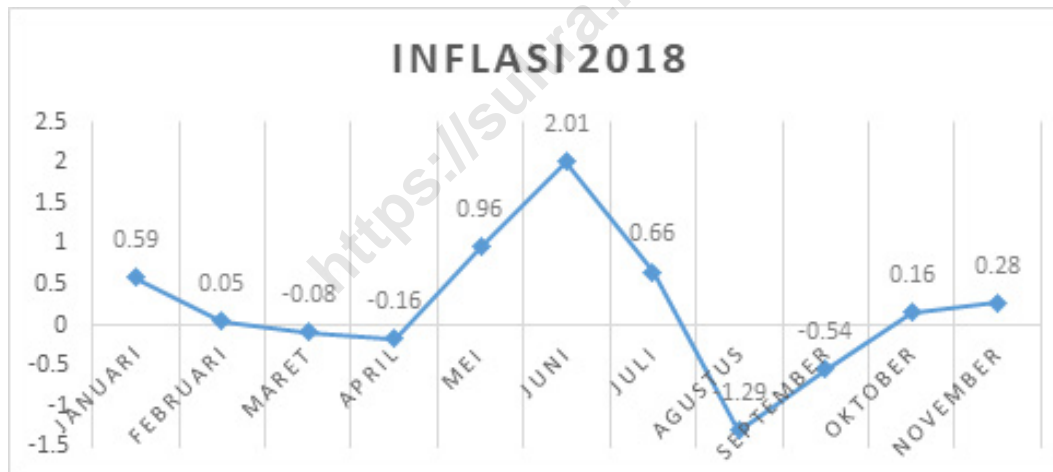
6,81 persen. Hal ini berbanding terbalik bila dibandingkan antara triwulan II 2019 dibanding triwulan I 2019 yang tumbuh 6,81 persen meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi minus 6,04 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 9,79 persen. Pertumbuhan ini dipengaruhi meningkatnya aktivitas perdagangan besar-eceran selama bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Diikuti Administrasi dan Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,39 persen serta Pertambangan dan Penggalan sebesar 8,89 persen.

B. Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Tenggara

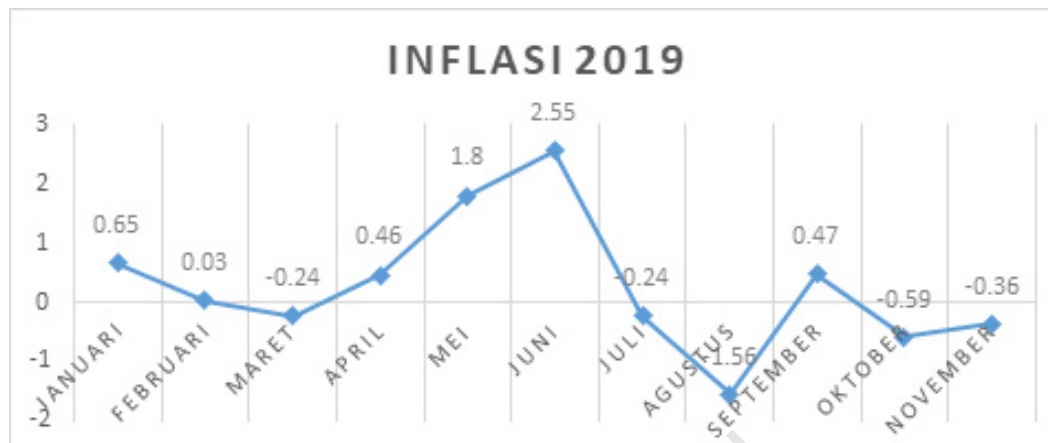
1. Inflasi

Pergerakan inflasi selama bulan Januari sampai dengan September 2019 menunjukkan tren peningkatan selama triwulan II (Gambar 3). Dibandingkan tahun sebelumnya terjadi perbedaan tren inflasi. Jika tahun 2018, peningkatan inflasi dimulai bulan Mei yaitu menjelang puasa dan lebaran, tahun 2019 peningkatan inflasi sudah dimulai bulan April menjelang Pemilu dan dilanjutkan menjelang puasa sampai lebaran. Peningkatan inflasi pada bulan April yaitu pada saat dilaksanakannya Pemilu terutama dipengaruhi kenaikan inflasi pada volatile food. Kenaikan komoditas tersebut lebih dikarenakan meningkatnya permintaan selama puasa dan lebaran, dan bukan karena faktor Pemilu.

Gambar 20. Inflasi Tahun 2018



Gambar 21. Inflasi Tahun 2019



Sumber : BPS

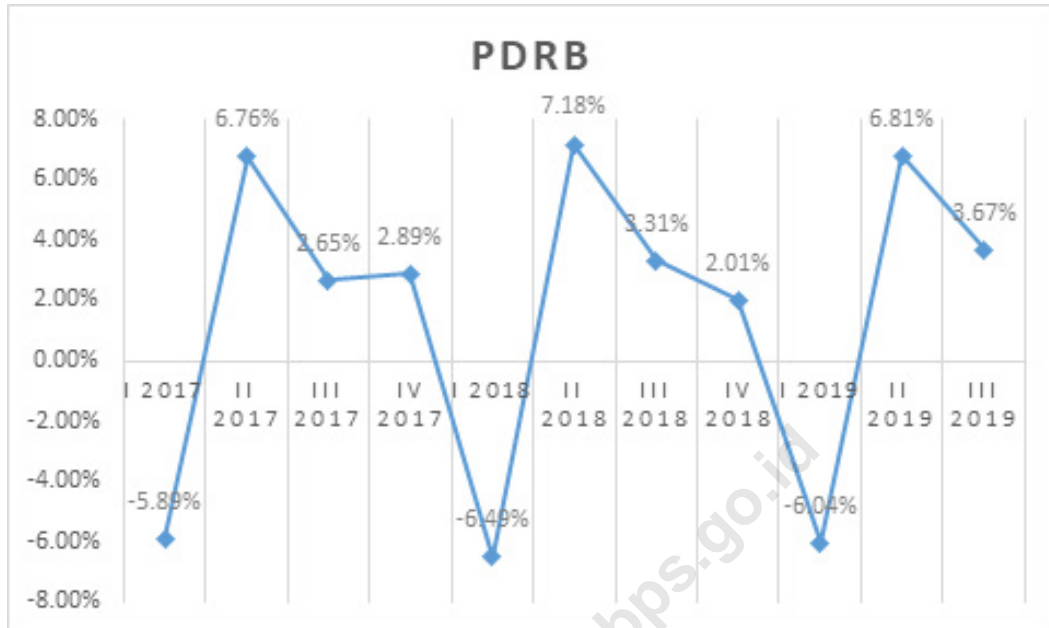
Untuk mengetahui perbedaan inflasi sebelum dan sesudah tahun pilpres, peneliti menggunakan uji Wilcoxon. Hasil yang diperoleh adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara inflasi yang terjadi pada tahun 2018 dan tahun 2019.

C. Pertumbuhan Ekonomi

Pengaruh Pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 tidak terlihat secara nyata. Hal ini juga terjadi pada pemilu tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2019 sebesar 6,33 persen, hanya lebih tinggi 0,18 persen dari pertumbuhan ekonomi triwulan I-2018. Namun jika dilihat dari komponen pengeluarannya, Pemilu telah mendorong PDRB pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT). Pada triwulan I-2019, LNPRT tumbuh 12,13 persen, tertinggi kedua setelah komponen Ekspor Barang dan Jasa pada PRDB. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan PK-LNPRT triwulan sebelumnya yang sebesar 7,03 persen saja.

Meskipun LNPRT triwulan I-2019 meningkat, namun PDRB pada triwulan tersebut secara keseluruhan lebih rendah dari triwulan IV-2018 yang tercatat mengalami kontraksi minus 6,04 persen. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara Triwulan I-2019 terhadap Triwulan IV-2018 diwarnai oleh kontraksi pada hampir seluruh lapangan usaha, terutama beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar seperti: Konstruksi (minus 14,87 persen); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (minus 9,88 persen); Transportasi dan Pergudangan (minus 8,78 persen) serta Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (minus 8,23 persen).

Gambar 22. Angka Pertumbuhan PDRB I-2017 s/d III-2019



Sumber : BPS

Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan PDRB sebelum dan sesudah tahun pilpres, peneliti menggunakan uji Wilcoxon. Hasil yang diperoleh adalah tidak ada perbedaan yang signifikan pertumbuhan PDRB yang terjadi pada tahun 2018 dan tahun 2019.

D. Kesimpulan

Pemilu secara langsung di Indonesia telah terjadi sebanyak empat kali, berlangsung dengan baik dan ltern. Kondisi ini secara nyata tidak berdampak lternat pada perekonomian Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu mengarah pada kesimpulan yang sama. Kesimpulan tersebut menyebutkan jika Pemilu hanya menyebabkan lternati lternat dalam jangka pendek. Sentimen lternat ini merupakan reaksi pasar yang mengambil posisi wait and see selama perhelatan pemilu.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pola inflasi pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain inflasi lebih banyak di pengaruhi oleh peningkatan permintaan barang menjelang bulan ramadhan dan Idul Fitri.

Untuk komponen yang terpengaruh positif oleh adanya pemilu adalah pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT). Konsumsi partai politik dalam penyelenggaraan Pemilu adalah salah satu pendorongnya.

E. Referensi

Amrun, Adam Fairu dan Teguh Dartanto. (2014). Dampak Pemilihan Umum 2014 Terhadap Indikator Makroekonomi. LPEM FEUI Brief, Agustus 2014.

Anaroga, Pandji dan Piji Pakarti. (2008). Pengantar Pasar Modal. Rineka Cipta, Jakarta.

- Badan Pusat Statistik. (2018). Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Triwulan I-2018. Berita Resmi Statistik, No. 27/05/Th. X, 7 Mei 2018
- Badan Pusat Statistik. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Triwulan I-2019. Berita Resmi Statistik, No. 27/05/74/Th. XII, 6 Mei 2019
- Badan Pusat Statistik. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Triwulan II-2019. Berita Resmi Statistik, No. 47/08/74/Th. XII, 5 Agustus 2019
- Badan Pusat Statistik. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Triwulan III-2019. Berita Resmi Statistik, No. 47/08/74/Th. XII, 5 November 2019
- Imelda, Hermanto Siregar, dan Lukytawati Anggraeni. (2014). Abnormal Returns and Trading Volume in the Indonesian Stock Market in Relation to the Presidential Election in 2004, 2009, and 2014. *International Journal of Administrative Science & Organization*, May 2014.
- Suwaryo. (2008). Dampak Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Abnormal Return Investor. *Performance Business and Management Journal* Vol 7, No 2. Faculty of Economics and Business, Jenderal Soedirman University, Purwokerto.

F. Lampiran

Lampiran Uji Wilcoxon :

Uji Wilcoxon Signed Rank Test merupakan uji lternative dari uji pairing t test atau t paired apabila tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini dikenal juga dengan istilah Wilcoxon Match Pair Test. Pengujian dilakukan dua kali, yakni pengujian data inflasi tahun 2018 dan 2019 serta data pertumbuhan PDRB tahun 2018 dan 2019. Hipotesis-hipotesis dari penelitian ini adalah :

H_0 = tidak ada perubahan signifikan antara inflasi tahun 2018 dan tahun 2019

H_1 = terdapat perubahan signifikan antara inflasi tahun 2018 dan tahun 2019

dan

H_0 = tidak ada perubahan signifikan antara pertumbuhan PDRB tahun 2018 dan tahun 2019

H_1 = terdapat perubahan signifikan antara pertumbuhan PDRB tahun 2018 dan tahun 2019

Dengan dasar pengambilan keputusan :

1. Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0.05, maka H_0 ditolak
2. Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0.05, maka H_0 diterima.

Adapun hasil pengujian data inflasi adalah :

Tabel 1.9 Hasil Pengujian Inflasi

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Inflasi 2019 - Inflasi 2018	Negative Ranks	6 ^a	5,50	33,00
	Positive Ranks	5 ^b	6,60	33,00
	Ties	0 ^c		
	Total	11		

a. Inflasi 2019 < Inflasi 2018

b. Inflasi 2019 > Inflasi 2018

c. Inflasi 2019 = Inflasi 2018

Test Statistics^a

	Inflasi 2019 - Inflasi 2018
Z	,000 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

Nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 1,000 > 0,05 sehingga H0 diterima, sehingga tidak ada perubahan yang signifikan antara inflasi tahun 2018 dan tahun 2019.

Hasil pengujian pertumbuhan PDRB adalah :

Tabel 1.10 Hasil Pengujian PDRB

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
PDRB 2019 - PDRB 2018	Negative Ranks	1 ^a	2,00	2,00
	Positive Ranks	2 ^b	2,00	4,00
	Ties	0 ^c		
	Total	3		

a. PDRB 2019 < PDRB 2018

b. PDRB 2019 > PDRB 2018

c. PDRB 2019 = PDRB 2018

Test Statistics^a

	PDRB 2019 - PDRB 2018
Z	-,535 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,593

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,593 > 0,05 sehingga H0 diterima, sehingga tidak terdapat perubahan yang signifikan antara pertumbuhan PDRB tahun 2018 dan tahun 2019.

<https://sultra.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jl. Boulevard No. 1 Kendari, Sulawesi Tenggara
Telp. (0401) 3135363 Fax. (0401) 3122355
E-mail : bps7400@bps.go.id

ISBN 978-602-5407-42-0

